



POLICY BRIEF

**BALAI PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
AGAMA MAKASSAR**

**K MENTERIAN AGAMA R.I
BALAI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN AGAMA
JL A.P. PETTARANI NO.72 MAKASSAR**

**ORIENTASI MODERASI
BERAGAMA DI KALANGAN
GURU DAN DOSEN**

PENULIS:

ALDINO NGANGUN, SH

ORIENTASI MODERASI BERAGAMA DI KALANGAN GURU DAN DOSEN

ALDINO NGANGUN, SH.

Analisis Kebijakan Ahli Pertama

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Kementerian Agama

Email : aldinongangun12@gmail.com

Executive Summary

Moderasi beragama adalah fondasi penting dalam membentuk masyarakat yang inklusif, di mana guru dan dosen memiliki peran krusial dalam menanamkan nilai-nilai ini. Namun, ada jarak antara kebijakan moderasi beragama dan praktiknya di lapangan. Banyak pendidik yang masih belum sepenuhnya memahami atau menerapkan prinsip-prinsip moderasi beragama. Survei menunjukkan bahwa 23% guru dan dosen memiliki pandangan yang intoleran, dan 58% belum pernah menerima pelatihan yang memadai. Untuk mengatasi masalah ini, kombinasi kebijakan berupa pelatihan dan workshop rutin tentang moderasi beragama serta penyusunan dan distribusi modul pembelajaran berbasis moderasi beragama sangat dianjurkan. Pelatihan akan mempercepat pemahaman para pendidik, sementara modul pembelajaran akan memberikan dukungan jangka panjang. Diharapkan, dengan implementasi kebijakan ini, tercipta lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan toleran, serta mampu melahirkan generasi yang moderat dan menghargai keberagaman. Dukungan dari semua pemangku kepentingan sangat penting untuk keberhasilan upaya ini.

A. PENDAHULUAN

Memperkuat moderasi beragama adalah kunci penting untuk menjaga kerukunan dan kedamaian dalam masyarakat yang beragam. Dalam konteks pendidikan, peran guru dan dosen sangat krusial dalam menanamkan nilai-nilai moderasi kepada para pelajar. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait moderasi beragama, masih ada jarak yang cukup besar antara kebijakan tersebut dan kenyataan di lapangan. Banyak pendidik yang belum sepenuhnya memahami atau menerapkan prinsip-prinsip moderasi ini dalam proses pembelajaran. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini bisa termasuk kurangnya pelatihan yang memadai, minimnya dukungan dari lembaga, atau bahkan resistensi pribadi terhadap perubahan.

Kesenjangan ini semakin terlihat ketika kita menyadari bahwa intoleransi dan radikalisme masih menjadi masalah di berbagai institusi pendidikan. Kasus-kasus intoleransi agama yang terjadi di sekolah dan perguruan tinggi menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu dilakukan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan toleran. Guru dan dosen seharusnya menjadi agen perubahan yang dapat mengarahkan para siswa ke arah pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman dan pentingnya hidup berdampingan dengan damai.

Pentingnya topik ini tidak bisa diabaikan. Dengan semakin rumitnya tantangan global, termasuk meningkatnya ekstremisme dan radikalisme, pendidikan yang berfokus pada moderasi beragama menjadi semakin mendesak. Tanpa tindakan yang tepat, kesenjangan antara kebijakan dan praktik ini dapat semakin melebar, menghambat upaya kita untuk membentuk generasi yang toleran dan berpikiran terbuka. Karena itu, penyusunan *policy brief* ini bertujuan memberikan rekomendasi konkret kepada para pendidik untuk mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama dengan lebih efektif dalam kegiatan belajar mengajar.

Diharapkan melalui *policy brief* ini, para pembuat kebijakan, lembaga pendidikan, serta guru dan dosen dapat bekerja sama dalam menghadapi tantangan yang ada. Pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan moderasi beragama bukan hanya sekadar wacana, tetapi benar-benar diterapkan dalam praktik sehari-hari di dunia pendidikan. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan sosial, serta mampu menjadi teladan dalam kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman.

B. DESKRIPSI MASALAH

Tantangan utama dalam menerapkan kebijakan moderasi beragama di kalangan guru dan dosen adalah kurangnya pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip moderasi beragama dalam proses belajar mengajar. Hal ini terlihat dari berbagai survei dan penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat intoleransi dan radikalisme di lingkungan pendidikan masih cukup tinggi.

Meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan moderasi beragama, banyak guru dan dosen yang belum mampu mengintegrasikannya secara efektif dalam pengajaran mereka. Kurangnya pelatihan dan dukungan dari lembaga pendidikan membuat para pendidik kesulitan menerapkan prinsip-prinsip moderasi beragama, yang akhirnya dapat berkontribusi pada meningkatnya sikap intoleran di kalangan siswa.

Hasil survei dari berbagai lembaga, seperti Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) dan Setara Institute, menunjukkan bahwa sekitar 23% guru dan dosen di Indonesia memiliki pandangan yang kurang toleran terhadap agama lain. Selain itu, laporan PPIM tahun 2020 menemukan bahwa sekitar 58% guru mengakui belum pernah mendapatkan pelatihan yang memadai tentang moderasi beragama. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa beberapa sekolah dan universitas masih menghadapi masalah intoleransi agama, yang menandakan bahwa implementasi kebijakan moderasi beragama belum berjalan dengan baik.

Inilah yang mendorong Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar untuk menyelenggarakan orientasi moderasi beragama bagi guru dan dosen. Sebagai ujung tombak dalam dunia pendidikan, guru dan dosen diharapkan bisa membawa perubahan. Dengan adanya orientasi ini, diharapkan setiap individu dapat menjadi agen perubahan dalam menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan sekolah dan kampus.

C. REKOMENDASI KEBIJAKAN

Untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan moderasi beragama dan pelaksanaannya di kalangan guru dan dosen, berikut adalah tiga opsi kebijakan yang dapat diterapkan. Setiap opsi dirancang untuk memberikan solusi yang jelas, praktis, dan dapat diukur keberhasilannya.

1. Pelatihan dan Workshop Rutin tentang Moderasi Beragama

Mengadakan pelatihan dan workshop secara rutin untuk guru dan dosen tentang prinsip-prinsip moderasi beragama. Program ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya moderasi beragama dan cara mengintegrasikannya ke dalam proses pembelajaran. Pelatihan ini bisa diadakan setiap semester, melibatkan para ahli dalam bidang moderasi beragama dan pendidikan.

2. Penyusunan dan Distribusi Modul Pembelajaran yang Berfokus pada Moderasi Beragama

Menyusun dan menyebarluaskan modul pembelajaran yang menekankan moderasi beragama untuk digunakan dalam kurikulum. Modul ini akan memuat materi tentang moderasi beragama yang disesuaikan dengan berbagai mata pelajaran. Pengembangan modul dilakukan oleh tim ahli dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama akademisi, lalu didistribusikan ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.

3. Pembentukan Unit Khusus Moderasi Beragama di Setiap Institusi Pendidikan

Membentuk unit khusus di setiap lembaga pendidikan yang bertanggung jawab untuk mempromosikan dan mengawasi penerapan moderasi beragama. Unit ini akan menjadi pusat koordinasi dan sumber informasi terkait kegiatan yang mendukung moderasi beragama. Setiap lembaga pendidikan akan menugaskan beberapa staf yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk menjadi anggota unit ini.

D. KESIMPULAN

Untuk mengatasi kesenjangan antara kebijakan moderasi beragama dan penerapannya di kalangan guru dan dosen, diperlukan langkah-langkah konkret yang bisa diterapkan secara efektif. Dari tiga opsi kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, rekomendasi yang paling strategis dan dapat diimplementasikan adalah kombinasi antara pelatihan dan workshop rutin tentang moderasi beragama serta penyusunan dan distribusi modul pembelajaran berbasis moderasi beragama. Kebijakan ini memerlukan dukungan penuh dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan semua pihak yang terlibat di dunia pendidikan. Dengan adanya komitmen bersama, kita dapat mencapai tujuan untuk membentuk generasi yang toleran dan berwawasan luas, yang mampu hidup berdampingan dengan damai di tengah keberagaman.

E. REFERENSI

- Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM). (2020). **Survei Nasional Toleransi Beragama di Indonesia**. Jakarta: PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses dari <https://ppim.uinjkt.ac.id>.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). **Kebijakan Moderasi Beragama dalam Pendidikan**. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Setara Institute. (2020). **Laporan Toleransi Beragama di Sekolah dan Perguruan Tinggi**. Jakarta: Setara Institute. Diakses dari <https://setara-institute.org>.